

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT TERHADAP
PERUBAHAN STATUS GUNUNG MUTIS DARI CAGAR ALAM MENJADI
TAMAN NASIONAL BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI LHK NOMOR
946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2024**

Nama : Raphael Yoel Kurniawan
Jurusan : Hukum
Pembimbing : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, S.H.,M.Hum.
Jennifer, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perubahan fungsi kawasan Gunung Mutis dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2024 telah menimbulkan implikasi yuridis yang mendalam. Bagi masyarakat adat Mollo, Gunung Mutis merupakan entitas sakral yang tak terpisahkan dari identitas spiritual mereka. Perubahan status ini secara fundamental mengubah paradigma pengelolaan dari perlindungan mutlak (*strict preservation*) dalam rezim Cagar Alam menjadi pemanfaatan terbatas (*conservation with utilization*) dalam rezim Taman Nasional. Pergeseran ini membuka ruang legal bagi zonasi wisata dan investasi komersial yang berpotensi mendegradasi kesakralan wilayah adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Menteri a quo mengandung cacat prosedural dan kelemahan substantif. Secara prosedural, penerbitan keputusan tersebut tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan, karena mengabaikan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* tidak terpenuhi karena sosialisasi dilakukan pasca penerbitan keputusan, menihilkan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan di awal. Secara substantif, skema "Zona Tradisional" yang ditawarkan tidak memberikan kepastian hukum yang setara dengan hutan adat, melainkan hanya menempatkan masyarakat sebagai pemegang izin akses yang diberikan oleh negara (*constitutive*). Hal ini tidak selaras dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Oleh karena itu, kebijakan ini memerlukan peninjauan ulang demi tercapainya keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat.

Kata kunci: Gunung Mutis, Masyarakat adat Mollo, Taman Nasional, Cacat Prosedur, FPIC

**LEGAL PROTECTION ANALYSIS FOR INDIGENOUS PEOPLES
REGARDING THE CHANGE OF MOUNT MUTIS STATUS FROM NATURE
RESERVE TO NATIONAL PARK BASED ON THE DECREE OF THE
MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY NUMBER
946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2024**

Nama : Raphael Yoel Kurniawan
Jurusan : Hukum
Pembimbing : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, S.H.,M.Hum.
Jennifer, S.H., M.H.

ABSTRACT

The functional change of the Mount Mutis area from a Nature Reserve to a National Park through the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number 946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2024 has caused profound juridical implications. For the Mollo indigenous people, Mount Mutis is a sacred entity inseparable from their spiritual identity. This change in status fundamentally alters the management paradigm from strict preservation within the Nature Reserve regime to conservation with utilization within the National Park regime. This shift opens a legal avenue for tourism zoning and commercial investment, which potentially degrades the sacredness of the customary territory. This study is a normative juridical research utilizing both statute and conceptual approaches. The results indicate that the Decree a quo contains procedural defects and substantive weaknesses. Procedurally, the issuance of the decree failed to meet the General Principles of Good Administration (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AUPB), specifically the principle of openness, as it neglected the principle of meaningful participation. The principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) was not fulfilled because socialization was conducted subsequent to the decree's issuance, thereby nullifying the community's right to grant prior consent. Substantively, the offered "Traditional Zone" scheme does not provide legal certainty equivalent to Customary Forests (Hutan Adat); rather, it merely positions the community as holders of access permits granted by the state (constitutive). This is inconsistent with the spirit of the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012. Therefore, this policy requires a review to achieve substantive justice for the indigenous law community.

Keywords: *Mount Mutis, Mollo Indigenous People, National Park, Procedural Defect, FPIC.*